



3 Wilayah di DIY Masuk Pembatasan Ketat

JOGJA-Pemerintah Pusat memberlakukan pembatasan ketat selama dua pekan di sejumlah wilayah untuk menekan penyebaran Covid-19. Di DIY, ada tiga daerah yang masuk kriteria harus dibatasi.

Lucas Subarkah, David Kurniawan, & Abdul Hamid Razak
redaksi@harianjogja.com

- ▶ Pemda masih akan memetakan wilayah mana yang memenuhi kriteria pembatasan tersebut.
- ▶ Teknis pembatasan baru, akan dirumuskan melalui rapat dengan bupati/wali kota.

Di DIY tiga kabupaten yakni Gunungkidul, Kulonprogo, dan Sleman, masuk dalam wilayah yang wajib memberlakukan kebijakan itu. Pembatasan secara mikro dilakukan untuk mengerem penambahan kasus positif Covid-19.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, menjelaskan Pemerintah membatasi kegiatan masyarakat di daerah-daerah yang memenuhi kriteria pada 11-25 Januari 2021.

Sejumlah kriteria itu seperti tingkat kematian di atas rata-rata nasional (3%), tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional (82%), kasus aktif di bawah rata-rata nasional (14%), dan keterisian rumah sakit di atas 70%. (selengkapnya lihat grafis).

▶ Halaman 10



Instansi	Tindak Lanjut
1.	☐ Untuk Ditanggapi
2.	☐ Untuk Diketahui
3.	☐ Jumpa Pers
4.	
5.	

3 Wilayah...

"Nah penerapan pembatasan secara terbatas dilakukan di provinsi Jawa-Bali, karena di seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan," katanya.

Airlangga mengatakan pemerintah daerah masing-masing akan menentukan wilayah mana yang memenuhi kriteria pembatasan tersebut.

Salah satu pembatasan yang diterapkan seperti di tempat kerja dengan *work from home* 75% dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Selain itu, belajar-mengajar dilakukan daring, sementara tempat ibadah dibatasi kapasitas 50%. Jam operasional mal dan restoran juga harus diatur dan diawasi ketat.

Kebijakan di DIY

Sekda DIY, Kadamanta Baskara Aji, mengatakan pada Rabu, ia bersama dengan Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, mengikuti rapat bersama Presiden, Menteri, dan seluruh Gubernur secara virtual. Salah satu keputusan dalam rapat itu yakni sejumlah daerah di Jawa dan Bali diminta melakukan pembatasan.

"Saya kira hampir sama aturan yang kami buat pada Nataru (Natal dan Tahun Baru), tempat wisata dan keramaian dibatasi masuknya, lalu juga unsur pegawai baik negeri maupun swasta perlu ada batasan," ujarnya.

Meski demikian, kata dia, teknis pembatasan ini dikembalikan kepada masing-masing daerah. Untuk itu, Pemda DIY berkoordinasi dengan bupati/wali kota pada Kamis (7/1), hari ini. "Besok pagi (hari ini) Wagub (Wakil Gubernur DIY) akan memimpin rapat bersama bupati dan wali kota," katanya.

Mengenai teknis pembatasan baru akan dirumuskan dalam rapat dengan bupati/wali kota. "Itu menjadi bahan yang disampaikan kepada kepala daerah, diminta menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Apa yang disampaikan menjadi pertimbangan, acuan dalam menyusun regulasi. Bisa saja ada tambahan dari itu," ungkapnya.

Pelaksana Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Biwara Yuswantana, mengatakan pembatasan ini akan ditindak lanjut dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri untuk dilaksanakan di tingkat daerah.

"Pada intinya pusat menggariskan dengan kebijakan itu akan terjadi penurunan (kasus) sampai 50 persen. Tentu arahan besarnya seperti itu. Tapi secara konkret di daerah terkait *work from home*, objek wisata, tempat umum, akan seperti apa, sekarang baru disiapkan," katanya.

Mirip Minggu Tenang

Kabupaten Sleman masuk dalam daftar daerah yang wajib melaksanakan pembatasan secara ketat. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman, Joko Hastaryo mengatakan penerapan pembatasan yang akan dilakukan hampir mirip dengan konsep minggu tenang yang pernah



Marian Jagalski/Deel Bureaus

Sebanyak 15 wartawan yang bertugas di kompleks Kantor Gubernur DIY menjalani *rapid test* antigen di Pos Kesehatan Posko Dukungan Satgas Covid-19 DIY di Jalan Kenari, Jogja, Rabu (6/1). Pelaksanaan *rapid test* antigen sebagai bagian dari *tracing* kasus positif pegawai Pemda DIY. Seluruh wartawan yang menjalani test dinyatakan negatif.

sudah dapat info lebih dulu tentang rencana PSBB (pembatasan sosial berskala besar) termasuk DIY sehingga penerapan minggu tenang seakan menunggu keputusan itu," katanya.

Konsep Minggu Tenang Covid-19, lanjut Joko, mirip-mirip dengan rencana pembatasan baru yang dicanangkan Pemerintah Pusat. Meski demikian, katanya ada sejumlah item yang harus disesuaikan dengan kondisi Sleman. "Kami akan mencermati setiap itemnya, ya kurang lebih 90 persen mirip konsep minggu tenang. Kami senang kalau itu diterapkan," katanya.

Adapun, Kepala Dinkes Gunungkidul, Dewi Irawaty mengaku belum bisa menjelaskan lebih lanjut kebijakan pembatasan baru. Berdasarkan pembahasan melalui video konferensi, kabupaten masih menunggu instruksi dari provinsi.

"Tadi (kemarin) sempat dibahas dalam video konferensi membahas masalah vaksin. Untuk pembatasan, masih menunggu arahan dan kebijakan dari Pemerintah DIY," katanya.

Menurut dia, masih ada waktu untuk menetapkan kebijakan pada saat pembatasan mikro dilaksanakan. "Kam mulai tanggal 11, jadi kami masih ada waktu persiapan sambil menunggu instruksi dari provinsi," katanya.

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kulonprogo juga setali tiga uang. "Mohon maaf kami belum mendapatkan informasi resmi dan arahan lebih lanjut dari Satgas Pusat ataupun Gugus Tugas DIY. Saat ini kami masih menunggu instruksi gubernur berkaitan dengan hal itu," kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kulonprogo, Buning Rahayujati.

Meski Kota Jogja dan Bantul tak masuk daftar pembatasan, Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Jogja, Heroe Poerwadi masih menunggu teknis pembatasan untuk menentukan strategi yang akan diterapkan di Kota Jogja.

"Kami tunggu dulu teknisnya bagaimana. Karena besok (hari ini) Kamis baru akan ada rapat koordinasi dengan Gubernur dan Kepala Daerah se-DIY. Kami menunggu konsep dan proses pelaksanaannya seperti apa," ujarnya.

berdasarkan pemeriksaan pada 1.227 sampel dari 1.181 orang. Bantul mendominasi penambahan sebanyak 97 kasus. Sebanyak 290 kasus dinyatakan sembuh dan empat kasus dilaporkan meninggal.

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih, menjelaskan penambahan kasus berdasarkan domisili meliputi Bantul (97 kasus), Sleman (92), Kota Jogja (31), Kulonprogo (30), dan Gunungkidul (22).

Dilihat dari riwayatnya, penambahan kasus terdiri dari *tracing* kasus positif 142 kasus, periksa mandiri (67 kasus), *screening* karyawan kesehatan (7 kasus), dan belum ada keterangan (56 kasus).

Sebanyak empat kasus dilaporkan meninggal dunia meliputi Kasus 10.666, laki-laki, 58, warga Gunungkidul; Kasus 11.222, laki-laki, 71, warga Kulonprogo; Kasus 12.375, perempuan, 68, warga Sleman; dan Kasus 12.721, laki-laki, 52, warga Gunungkidul.

Adapun kasus sembuh berdasarkan domisili meliputi Kota Jogja 100 kasus, Bantul 111 kasus, Kulonprogo 22 kasus, Gunungkidul 18 kasus, dan Sleman 39 kasus. Dengan penambahan ini maka total kasus positif DIY menjadi sebanyak 13.612 kasus. Rincian total kasus positif meliputi 4.123 kasus aktif, 9.192 kasus sembuh, dan 297 kasus meninggal. Sementara penggunaan *bed* di rumah sakit rujukan untuk kritikal 53 *bed*, sisa 23 *bed*; dan untuk nonkritikal digunakan 579 *bed*, sisa 62 *bed*.

Kepala Bagian Humas Pemda DIY, Ditya Nanaroyo Aji, mengatakan empat pegawai Bagian Humas Pemda DIY terkonfirmasi positif termasuk dirinya sendiri.

"Sejauh ini ada empat yang positif, saya hasil tes PCR (*polymerase chain reaction*), tiga staf hasil *swab* antigen," ujarnya.

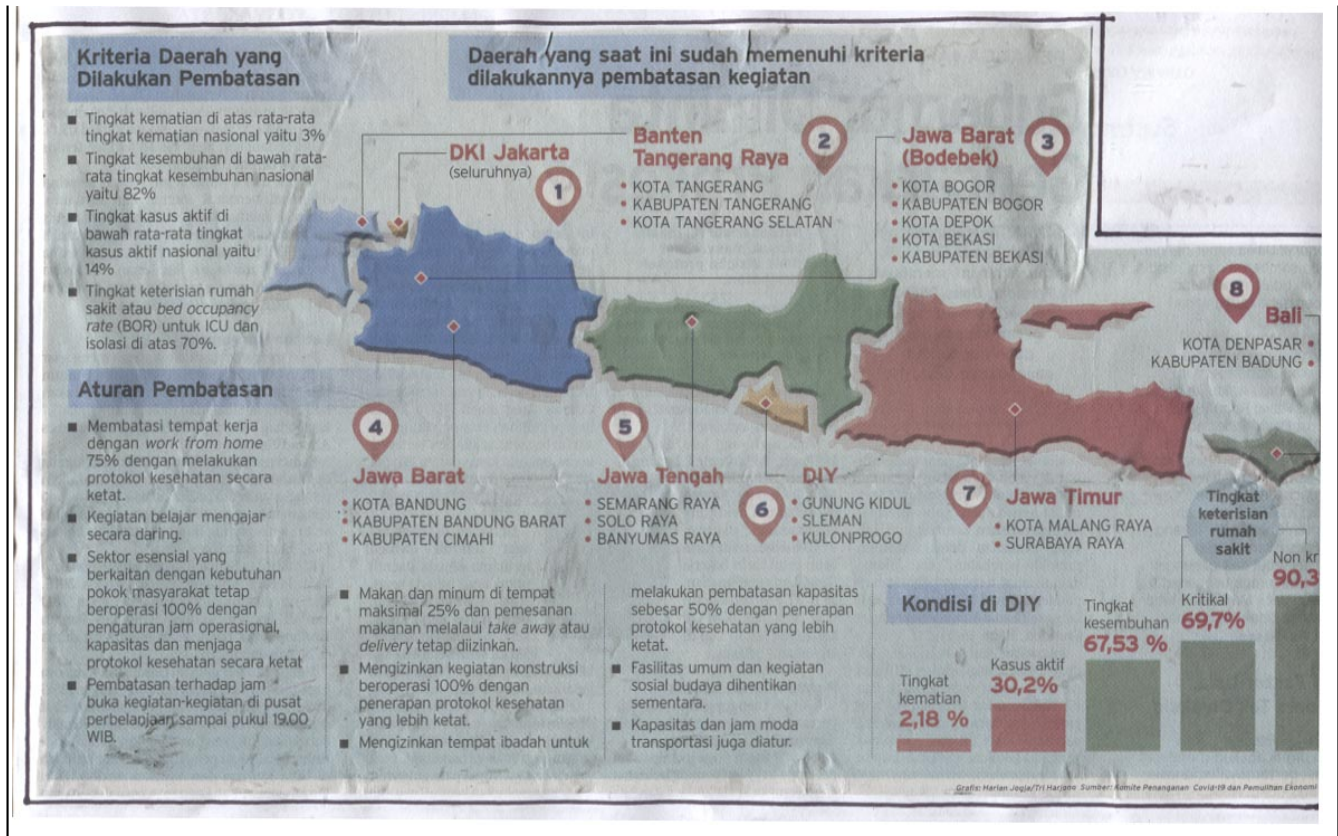
Dengan penemuan ini, Humas Pemda DIY menapis seluruh staf yang beraktivitas di gedung Bale Wara, termasuk 15 orang wartawan. Semua wartawan yang mengikuti tes antigen di Tim Reaksi Cepat BPBD DIY dinyatakan negatif.

Menindaklanjuti hal ini, jawabannya akan menerapkan *work from home*



PEMBATASAN DI JAWA-BALI DEMI MENEKAN COVID-19

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengumumkan kebijakan pembatasan baru yang berlaku di sejumlah wilayah dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Pembatasan berlaku di beberapa wilayah di Indonesia pada 11-25 Januari 2021. DIY masuk dalam kriteria daerah yang mesti menerapkan pembatasan.



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 17 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005